



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 1. Administrator Kesehatan;
 2. Analis Kebijakan;
 3. Analis Kepegawaian;
 4. Analis Pasar Hasil Pertanian;
 5. Auditor;
 6. Auditor Kepegawaian;
 7. Apoteker;
 8. Asisten Apoteker;
 9. Assessor SDM Aparatur;
 10. Bidan;
 11. Dokter;
 12. Dokter Gigi;
 13. Entomolog Kesehatan;
 14. Epidemiolog Kesehatan;
 15. Fisioterapis;
 16. Guru;
 17. Inspektur Ketenagalistrikan;
 18. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
 19. Inspektur Tambang;
 20. Instruktur;
 21. Medik Veteriner;
 22. Mediator Hubungan Industrial;
 23. Nutrisionis;
 24. Okupasi Terapis;
 25. Operator Transmisi Sandi;
 26. Pamong Belajar;
 27. Pamong Budaya;
 28. Paramedik Veteriner;
 29. Pekerja Sosial;

30. Pembimbing Kesehatan Kerja;
31. Penata Ruang;
32. Penilik;
33. Peneliti;
34. Penera;
35. Penerjemah;
36. Pengantar Kerja;
37. Pengawas Benih Tanaman;
38. Pengawas Bibit Ternak;
39. Pengawas Ketenagakerjaan;
40. Pengawas Lingkungan Hidup;
41. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
42. Pengawas Mutu Pakan;
43. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
44. Pengawas Perikanan;
45. Pengawas Sekolah;
46. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
47. Pengendali Dampak Lingkungan;
48. Pengendali Ekosistem Hutan;
49. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
50. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
51. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
52. Penggerak Swadaya Masyarakat;
53. Penyelidik Bumi;
54. Penyuluh Kehutanan;
55. Penyuluh Keluarga Berencana;
56. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
57. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
58. Penyuluh Perikanan;
59. Penyuluh Pertanian;
60. Penyuluh Sosial;
61. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
62. Perawat;
63. Perawat Gigi;
64. Perekam Medis;
65. Perakayasa;
66. Perencana;
67. Polisi Kehutanan;
68. Pustakawan;
69. Pranata Hubungan Masyarakat;
70. Pranata Komputer;
71. Pranata Laboratorium Kesehatan;
72. Psikolog Klinis;
73. Radiografer;
74. Sandiman;
75. Sanitarian;
76. Surveyor Pemetaan;
77. Statistisi;
78. Teknik Jalan dan Jembatan;
79. Teknik Pengairan;
80. Teknik Penyehatan Lingkungan;
81. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
82. Teknisi Elektromedis;
83. Teknisi Penelitian dan Perakayaan;
84. Terapis Wicara;
85. Widyaiswara.

2. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2008
 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|-----|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BIRO TATA PEMERINTAHAN | - | - |
| 2. | BIRO HUKUM | - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 3 |
| 3. | BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | - | - |
| 4. | BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | - | - |
| 5. | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | - PENELITI | 2 |
| 6. | BIRO ORGANISASI | - | - |
| 7. | BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL | 1. ARSIPARIS 2. PRANATA KOMPUTER 3. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT 4. OPERATOR TRANSMISI SANDI 5. SANDIMAN | 6 2 2 3 2 |
| 8. | SEKRETARIAT DPRD | - ARSIPARIS | 1 |
| 9. | DINAS PERTANIAN | 1. ARSIPARIS 2. PENYULUH PERTANIAN 3. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 4. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 1 4 10 4 |
| 10. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1. PENGAWAS PERIKANAN 2. PENYULUH PERIKANAN | 7 1 |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN | 3 |
| 11. | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 1. ARSIPARIS | 1 |
| | | 2. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN | 4 |
| | | 3. POLISI KEHUTANAN | 30 |
| | | 4. PENYULUH KEHUTANAN | 4 |
| | | 5. PENYULUH PERTANIAN | 2 |
| | | 6. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 2 |
| 12. | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1. PENGAWAS SEKOLAH | 8 |
| | | 2. ARSIPARIS | 1 |
| | | 3. PENILIK | 2 |
| 13. | DINAS KEBUDAYAAN | - PAMONG BUDAYA | 3 |
| 14. | DINAS PARIWISATA | - | - |
| 15. | DINAS SOSIAL | 1. PEKERJA SOSIAL | 4 |
| | | 2. ARSIPARIS | 1 |
| | | 3. PENYULUH SOSIAL | 8 |
| 16. | DINAS KESEHATAN | 1. ARSIPARIS | 1 |
| | | 2. EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 2 |
| | | 3. ENTOMOLOG KESEHATAN | 1 |
| | | 4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 3 |
| | | 5. NUTRISIONIS | 1 |
| | | 6. SANITARIAN | 1 |
| | | 7. ADMINISTRATOR KESEHATAN | 3 |
| 17. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1. ARSIPARIS | 1 |
| | | 2. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | 3 |
| | | 3. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 3 |
| | | 4. PENGANTAR KERJA | 2 |
| 18. | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL | 1. TEKNIK PENGAIRAN | 2 |
| | | 2. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 25 |
| | | 3. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 15 |
| | | 4. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
| | | 5. PRANATA KOMPUTER | 1 |
| | | 6. ARSIPARIS | 1 |
| | | 7. INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN | 2 |
| | | 8. INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI | 2 |
| | | 9. INSPEKTUR TAMBANG | 2 |
| | | 10. PENYELIDIK BUMI | 1 |
| | | 11. SURVEYOR PEMETAAN | 1 |
| | | 12. PENATA RUANG | 3 |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|-----|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI | 1. PRANATA KOMPUTER 2. ARSIPARIS | 6 1 |
| 20. | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH | 1. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2. ARSIPARIS 3. PENGUJI MUTU BARANG | 6 1 2 |
| 21. | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | - ARSIPARIS | 1 |
| 22. | INSPEKTORAT | 1. AUDITOR 2. ARSIPARIS 3. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH | 65 1 10 |
| 23. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1. PENELITI 2. PERENCANA 3. ARSIPARIS | 2 25 1 |
| 24. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1. ANALIS KEPEGAWAIAN 2. ARSIPARIS 3. AUDITOR KEPEGAWAIAN 4. PRANATA KOMPUTER | 6 2 4 2 |
| 25. | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1. WIDYAIWARA 2. PUSTAKAWAN | 13 1 |
| 26. | BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 1. PUSTAKAWAN 2. ARSIPARIS 3. PRANATA KOMPUTER 4. PENERJEMAH | 25 20 2 2 |
| 27. | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 1. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN 2. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP 3. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 5 5 2 |
| 28. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | - | - |
| 29. | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN | 1. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 2. PENYULUH PERTANIAN 3. PENYULUH PERIKANAN | 16 8 1 |
| 30. | BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL | - | - |
| 31. | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT | 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT 2. PENYULUH KELUARGA BERENCANA | 2 2 |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
| 32. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | - | - |
| 33. | RUMAH SAKIT GRHASIA | 1. DOKTER 2. DOKTER GIGI 3. PERAWAT 4. APOTEKER 5. ASISTEN APOTEKER 6. PERAWAT GIGI 7. NUTRISIONIS 8. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 9. PEREKAM MEDIS 10. RADIOGRAFER 11. TEKNIK ELEKTROMEDIS 12. SANITARIAN 13. FISIOTERAPIS 14. OKUPASI TERAPIS 15. PEKERJA SOSIAL 16. PRANATA KOMPUTER 17. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 19 TERAPIS WICARA 20 ARSIPARIS 21 PSIKOLOG KLINIS | 29 3 129 6 9 2 8 9 10 3 1 6 2 2 2 1 1 4 |
| 34. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| | | JUMLAH | 669 |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2008
 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|----|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DINAS PERTANIAN | | |
| | 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian | - Pengawas Benih Tanaman | 35 |
| | 2. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura | - | - |
| | 3. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | - Widyaiswara | 12 |
| | 4. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan | 1. Pengawas Bibit Ternak 2. Medik Veteriner 3. Paramedik Veteriner 4. Pengawas Mutu Pakan | 6 6 6 2 |
| | 5. Balai Proteksi Tanaman Pertanian | - Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | 64 |
| 2. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| | 1. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan | 1. Pengawas Perikanan 2. Penyuluh Perikanan 3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | 10 2 2 |
| | 2. Pelabuhan Perikanan Pantai | - Pengawas Perikanan | 4 |
| 3. | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | | |
| | 1. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan | 1. Pengawas Benih Tanaman 2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | 10 28 |
| | 2. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan | - | - |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|----|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 3. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan | - | - |
| 4. | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA | | |
| | 1. Balai Latihan Pendidikan Teknik | - Instruktur | 44 |
| | 2. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar | - Pamong Belajar | 25 |
| | 3. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan | - Pengembang Teknologi Pembelajaran | 6 |
| | 4. Balai Pemuda dan Olahraga | - | - |
| | 5. SMP Negeri 1 Galur | 1. Guru 2. Pustakawan | 34 1 |
| | 6. SMP Negeri 1 Karangmojo | 1. Guru 2. Pustakawan | 44 1 |
| | 7. SMP Negeri 1 Wates | 1. Guru 2. Pustakawan | 47 1 |
| | 8. SMP Negeri 1 Wonosari | 1. Guru 2. Pustakawan | 41 1 |
| | 9. SMA Negeri 1 Wonosari | 1. Guru 2. Pustakawan | 54 1 |
| | 10. SMA Negeri 2 Wates | 1. Guru 2. Pustakawan | 40 1 |
| | 11. SMK Negeri 2 Pengasih | 1. Guru 2. Pustakawan | 178 1 |
| | 12. SMK Negeri 2 Wonosari | 1. Guru 2. Pustakawan | 146 1 |
| | 13. SLB Negeri Pembina Yogyakarta | 1. Guru 2. Pustakawan | 55 1 |
| | 14. SLB Negeri 1 Yogyakarta | 1. Guru 2. Pustakawan | 52 1 |
| | 15. SLB Negeri 2 Yogyakarta | 1. Guru 2. Pustakawan | 38 1 |
| | 16. SLB Negeri 1 Bantul | 1. Guru 2. Pustakawan | 114 1 |
| | 17. SLB Negeri 2 Bantul | 1. Guru 2. Pustakawan | 37 1 |
| | 18. SLB Negeri 1 Gunungkidul | 1. Guru 2. Pustakawan | 29 1 |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 19. SLB Negeri 2 Gunungkidul | 1. Guru 2. Pustakawan | 25 1 |
| | 20. SLB Negeri 1 Sleman | 1. Guru 2. Pustakawan | 34 1 |
| | 21. SLB Negeri 1 Kulonprogo | 1. Guru 2. Pustakawan | 49 1 |
| 5. | DINAS KEBUDAYAAN | | |
| | 1. Museum Negeri Sonobudoyo | 1. Pustakawan 2. Pamong Budaya | 2 10 |
| | 2. Taman Budaya | - Pamong Budaya | 15 |
| 6. | DINAS PARIWISATA | - | - |
| 7. | DINAS SOSIAL | | |
| | 1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | 1. Pekerja Sosial 2. Perawat 3. Dokter 4. Fisioterapis 5. Okupasi Terapis 6. Instruktur 7. Nutrisionis | 7 7 4 2 2 12 1 |
| | 2. Panti Sosial Karya Wanita | - Pekerja Sosial | 8 |
| | 3. Panti Sosial Bina Karya | 1. Pekerja Sosial 2. Perawat | 10 2 |
| | 4. Panti Sosial Bina Remaja | - Pekerja Sosial | 7 |
| | 5. Panti Sosial Asuhan Anak | - Pekerja Sosial | 12 |
| | 6. Panti Sosial Tresna Werdha | 1. Pekerja Sosial 2. Perawat | 20 6 |
| | 7. Panti Sosial Pamardi Putra | 1. Pekerja Sosial 2. Perawat | 7 5 |
| 8. | DINAS KESEHATAN | | |
| | 1. Rumah Sakit Khusus Paru Respira | 1. Dokter 2. Perawat 3. Apoteker 4. Asisten Apoteker 5. Pranata Laboratorium Kesehatan 6. Nutrisionis 7. Radiografer 8. Perekam Medis 9. Sanitarian 10. Teknisi Elektromedis 11. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 12. Fisioterapis | 21 51 3 3 12 2 7 5 3 2 5 3 |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2. Balai Laboratorium Kesehatan | 1. Pranata Laboratorium Kesehatan 2. Dokter 3. Teknisi Elektromedis 4. Perekam Medis 5. Perawat 6. Pranata Komputer 7. Apoteker | 47 2 2 3 2 2 2 |
| | 3. Balai Pelatihan Kesehatan | 1. Apoteker 2. Asisten Apoteker 3. Bidan 4. Dokter 5. Nutrisionis 6. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 7. Perawat 8. Widyaiswara | 1 1 4 2 1 1 2 15 |
| | 4. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan | - | - |
| 9. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI | | |
| | 1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas | 1. Instruktur 2. Pranata Komputer | 77 2 |
| | 2. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja | 1. Teknisi Penelitian dan Perekayasa 2. Perekayasa 3. Dokter 4. Perawat 5. Pembimbing Kesehatan Kerja | 13 5 1 1 2 |
| 10. | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL | | |
| | 1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air | - Teknik Pengairan | 4 |
| | 2. Balai Pengujian, Informasi Perumahan dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi | - Teknisi Penelitian dan Perekayasa - Perekayasa | 6 2 |
| | 3. Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah | - Teknik Penyehatan Lingkungan | 2 |
| 11. | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | 1. Trans Jogja | - | - |
| | 2. Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | - | - |

| NO | INSTANSI | JABATAN FUNGSIONAL | PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN |
|-----|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 3. Plaza Informasi | - Pranata Komputer | 4 |
| 12. | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH | | |
| | 1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 1. Perekayasa 2. Teknisi Penelitian dan Perekayasa 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | 14 6 1 |
| | 2. Balai Metrologi | - Penera | 35 |
| | 3. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual | - Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | 2 |
| 13. | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | | |
| | 1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta | - | - |
| | 2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul | - | - |
| | 3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul | - | - |
| | 4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo | - | - |
| | 5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman | - | - |
| 14. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | |
| | - Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | - Assessor SDM Aparatur | 8 |
| 15. | BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL | | |
| | 1. Kantor Perwakilan Daerah | - Pamong Budaya | 1 |
| | 2. Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu | - | - |
| | | JUMLAH | 1825 |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001